



Bakes
bangpoi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jalan Tanuwijaya No 7, Tasikmalaya
Website: kesbang.tasikmalayakab.go.id
e-mail: kesbangpol@tasikmalayakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Adapun penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-lima pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan laporan capaian kinerja ini, sehingga Kami berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga Kami mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua

Tasikmalaya, Januari 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA

ASEP DARISMAN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680101 198803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bakesbangpol	2
1.3 Aspek Kepegawaian Dan Sarana Prasarana	5
1.4 Isu Strategis	7
1.5 Sistematika Penyusunan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis 2021-2026	9
2.2 Rencana Kerja 2025 dan Perubahan Rencana Kerja 2025.....	10
2.2.1 Rencana Kerja 2025.....	10
2.2.2 Perubahan Rencana Kerja 2025.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Bakesbangpol	17
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	28
3.3 Prestasi/ Penghargaan yang Diraih Bakesbangpol.....	34
BAB IV PENUTUP.....	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Saran Prasarana Balesbangpol Tahun 2025	6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpol 2021-2026 .	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Tahun 2025	11
Tabel 2.3 Perubahan Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Tahun 2025	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2025	14
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2025	16
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	17
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Bakesbangpol Tahun 2025	18
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran TA 2025	29
Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Anggaran TA 2025	32
Tabel 4.1 Realisasi Capaian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2025.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Stuktur Organisasi.....	4
Gambar 1.2 Data Pegawai.....	5
Gambar 3.1 Infografis Sasaran Strategis I.....	20
Gambar 3.2 Tren Capaian Kinerja Penanganan Konflik.....	20
Gambar 3.3 Infografis Sasaran Strategis II	23
Gambar 3.4 Tren Capaian Kinerja Nilai SAKIP.....	24
Gambar 3.5 Infografis Sasaran Strategis III	26
Gambar 3.6 Tren Capaian Kinerja Nilai IKM.....	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya;
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bakesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan ini tentunya bukan hanya sekedar perubahan nomenklatur saja, namun berkaitan dengan hal-hal yang bersifat esensi seperti peningkatan kinerja. Berubahnya status kantor menjadi badan, membuat struktur organisasi menjadi lebih gemuk, artinya dukungan personil bertambah dan beban kerja bisa dibagi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan beban kerja.

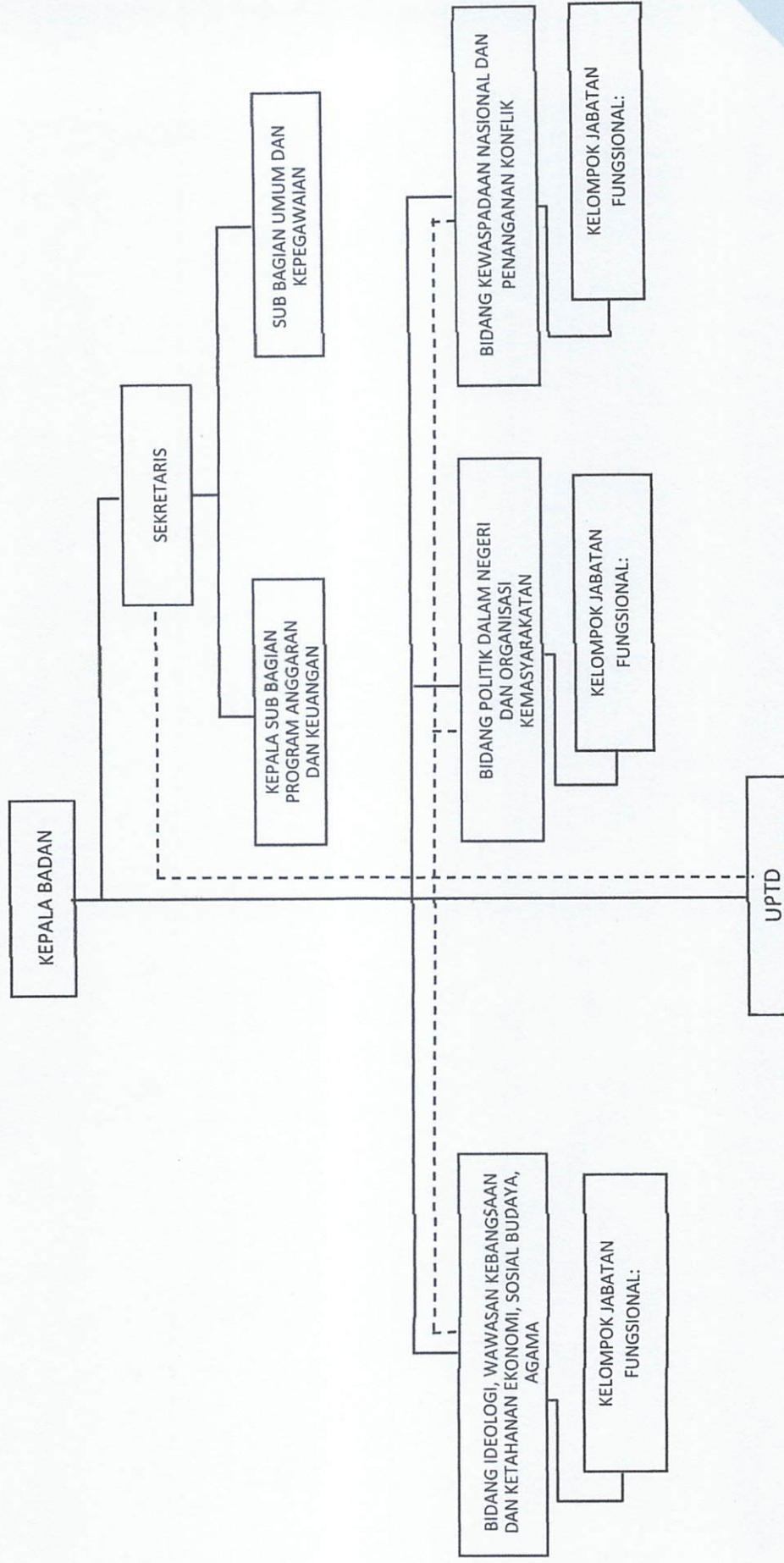
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tersebut kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Di mana dalam Pasal 86 Perbup nomor 39 ini disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, membina mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi penyelenggaraan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik serta pembinaan unit pelaksana teknis daerah.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang.

Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang terdiri dari Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Struktur Organisasi tersebut digambarkan sebagai berikut

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN**

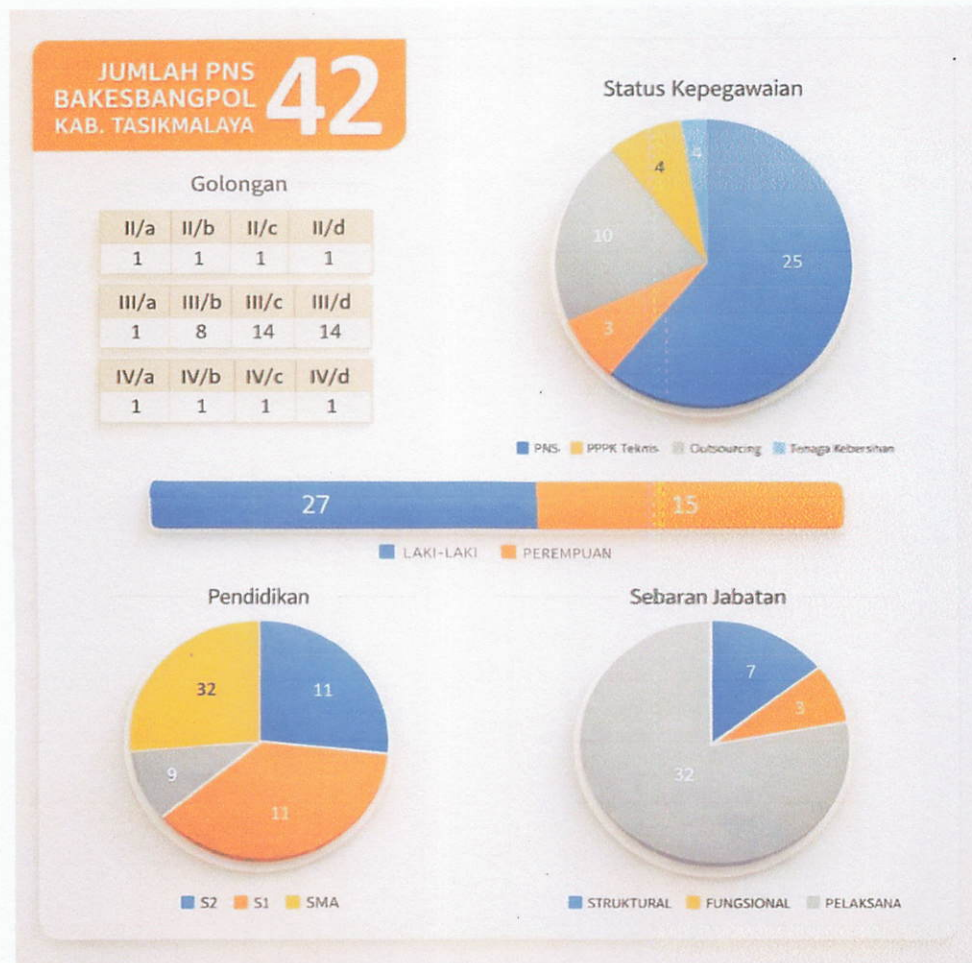


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

1.3 Aspek Kepegawaian Dan Sarana Prasarana

Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki jumlah pegawai sebanyak 42 orang dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 1.2 Data Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Susunan Perlengkapan

Perlengkapan sebagai 'perangkat keras' suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaraan pelaksanaan tugas suatu

organisasi. Saat ini perlengkapan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1
Saran Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5
2.	Sepeda Motor	9
3.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
4.	Rak Besi / Metal	6
5.	Filling Besi / Metal	7
6.	Band Kas	1
7.	Alat Penghancur Kertas	1
8.	Mesin Absensi	1
9.	Hecmaching Besar	1
10.	Meja Panjang	1
11.	Meja Rapat	6
12.	Kursi Tamu	2
13.	Kursi Putar	2
14.	Kursi Lipat	40
15.	Televisi	1
16.	Wireless	1
17.	Wireless Portable	1
18.	Stabilisator	2
19.	Camera Film	2
20.	Tustel	2
21.	Lambang Garuda Pancasila	1
22.	Handy Cam	2
23.	P.C Unit	5
24.	Lap Top	8
25.	Note Book	4
26.	Printer	10
27.	Modem	4
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3
29.	Audio Video Selector	1
30.	Telephone (PABX)	1
31.	Infocus	1

32.	Lemari Arsip	1
33.	Kursi Tunggu	5
34.	Tablet Samsung	1

1.4 Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, antara lain sebagai berikut:

1. Potensi konflik berlatar belakang ideologi, sosial politik hampir muncul tiap tahun di Kabupaten Tasikmalaya;
2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial;
3. Belum optimalnya peran ormas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah;
4. Meningkatnya ancaman terhadap ketahanan bangsa berupa proxy war (paham anti Pancasila, narkoba, hoax, radikalisme, isu SARA);
5. Masih rendahnya pendidikan politik terhadap masyarakat;
6. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi. Bab pendahuluan terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bakesbangpol
- 1.3 Aspek Kepegawaian Dan Sarana Prasarana
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Sistematika Penyusunan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

- 2.1 Rencana Strategis 2021-2026
- 2.2 Rencana Kerja 2025 dan Perubahan Rencana Kerja 2025
 - 2.2.1 Rencana Kerja 2025
 - 2.2.2 Perubahan Rencana Kerja 2025
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya masih menggunakan dasar pelaksanaan kegiatan dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi komitmen perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026.

Tahun 2025 merupakan tahun akhir pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026, sekaligus menjadi tahun transisi menuju periode perencanaan strategis berikutnya. Pada tahun ini, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 masih dalam tahap penyusunan, sehingga seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja dalam LKIP Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra 2021–2026 sebagai dokumen perencanaan yang masih berlaku.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 tidak terlepas dari keberlanjutan dan capaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan, konsistensi tujuan pembangunan, serta keberlanjutan pencapaian kinerja perangkat daerah sampai dengan ditetapkannya dokumen Renstra periode berikutnya.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur pimpinan, pejabat struktural dan fungsional, serta pemangku kepentingan terkait. Proses penyusunan Renstra telah melalui tahapan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya tercantum dalam Misi Kedua, yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan secara langsung dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpol 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Data Existing	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kondusifitas daerah	Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	83,30	83,70	84,05	84,65	84,90	85,10

2.2 Rencana Kerja 2025 dan Perubahan Rencana Kerja 2025

2.2.1 Rencana Kerja 2025

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Rencana kerja disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Persentase potensi dan kejadian konflik terkait ipoleksosbudhankam yang tertangani	Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
2.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75 (BB)
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	85,10

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan seperti di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 akan melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan serta 29 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 40.170.918.413 (Empat Puluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

2.2.2 Perubahan Rencana Kerja 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan anggaran dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja.

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya melakukan dua kali perubahan Rencana Kerja, sebagai respons terhadap dinamika kebijakan nasional, putusan lembaga yudisial, serta kebutuhan pelaksanaan program strategis daerah pada tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja pertama dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD serta adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2025.

Penyesuaian tersebut berdampak pada dilakukannya efisiensi anggaran pada beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kebijakan pengendalian belanja pemerintah, sekaligus dilakukan pengalokasian anggaran tambahan untuk mendukung pelaksanaan PSU.

Pada perubahan pertama ini, selain terjadi pengurangan anggaran akibat penerapan kebijakan efisiensi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, juga terjadi penambahan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berupa hibah kepada penyelenggara pemilihan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), guna mendukung kelancaran pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2025.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya pada perubahan pertama meningkat dari semula sebesar Rp40.170.918.413,00 menjadi Rp79.826.173.142,00.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja kedua dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini merupakan bagian dari proses penataan kembali alokasi anggaran perangkat daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Pada perubahan kedua tersebut, anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp71.365.904.929,00.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan strategis daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas politik, ketenteraman dan ketertiban umum, serta kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Seluruh penyesuaian target kinerja, program, kegiatan, dan alokasi anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021–2026.

Adapun indikator kinerja utama pada perubahan rencana kerja Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perubahan Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU sesuai Renja 2025	Target Kinerja IKU sesuai Perubahan Renja 2025
1.	Persentase potensi dan kejadian konflik terkait ipoleksosbudhankam yang tertangani	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%
2.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75 (BB)	75 (BB)
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	85,10	85,10

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan serta 29 sub kegiatan.

2.3 Perjanjian Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan standar Pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat daerah	BB (75)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	85,10

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 5.223.498.413	
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3.400.000.000	
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 7.625.120.000	
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 13.209.500.000	
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 1.471.900.000	
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 9.240.900.000	
	JUMLAH	Rp. 40.170.918.413	

Adanya perubahan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025, sehingga harus diikuti dengan penyusunan perjanjian kinerja perubahan seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan standar Pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat daerah	BB (75)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	85,10

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.223.423.413	
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3.830.000.000	
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 42.743.990.516	
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 5.683.750.000	
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 1.887.025.000	
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 11.997.716.000,	
	JUMLAH	Rp. 71.365.904.929	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu aspek dalam penyelenggaraan SAKIP adalah pelaporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	Baik
2	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB (75)	73,85	98,46%	Baik
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	85,10	89,98	105,73%	Sangat Baik
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja					101.39%	Sangat Baik

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tercapai sebesar **101.39%** maka capaian kinerja dikategorikan **"Sangat Baik"**.

Secara lebih rinci, evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I
Persentase potensi dan kejadian konflik
yang tertangani

Sasaran strategis pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya. Sasaran ini merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase potensi dan kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) yang tertangani.

Pengukuran capaian kinerja sasaran ini dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi yang dicapai, serta dianalisis secara komprehensif melalui perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, target jangka menengah Renstra, standar pembanding eksternal, program dan kegiatan pendukung, serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya. Ringkasan hasil analisis capaian kinerja Sasaran 1 Tahun 2025 disajikan dalam bentuk infografis sebagai berikut.



Gambar. 3.1 Infografis sasaran strategis I

Gambar di atas menunjukkan bahwa target persentase potensi dan kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) yang tertangani pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2025 juga mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh potensi dan kejadian konflik yang teridentifikasi selama Tahun 2025 dapat ditangani sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2024, realisasi indikator ini tetap berada pada angka 100%, sehingga capaian kinerja Sasaran 1 menunjukkan kondisi yang stabil dan konsisten dari tahun ke tahun.



Gambar. 3.2 Tren Capaian Kinerja Penanganan Konflik

Ditinjau dari aspek perencanaan lima tahunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026, capaian kinerja Tahun 2025 telah memenuhi target Renstra yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan konflik yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak awal periode perencanaan telah memberikan hasil yang optimal dan sejalan dengan sasaran strategis perangkat daerah. Tren capaian kinerja Sasaran 1 dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat ketercapaian yang konsisten, yang mengindikasikan efektivitas sistem kewaspadaan dini dan mekanisme penanganan konflik yang telah berjalan.

Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai target Sasaran Menurunnya Potensi Dan Kejadian Konflik pada Tahun 2025 didorong oleh adanya koordinasi yang intensif dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan terkait, optimalisasi peran kewaspadaan dini di daerah, serta respons cepat terhadap potensi konflik yang berkembang di masyarakat. Dukungan kebijakan dan komitmen lintas sektor turut memperkuat upaya pencegahan dan penanganan konflik di Kabupaten Tasikmalaya.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan tersebut antara lain melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik, peningkatan kapasitas aparatur, serta pelaksanaan kegiatan pemantauan dan deteksi dini secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.

Program yang mendukung pencapaian Sasaran 1 adalah program-program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan umum dan kewaspadaan nasional, yang dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan penanganan konflik serta penguatan stabilitas daerah, yang terdiri dari:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Dari sisi penggunaan anggaran, capaian sasaran strategis ini diperoleh dengan tingkat efisiensi yang memadai. Rencana anggaran sebesar Rp. 66.142.481.516,00 direalisasikan sebesar Rp. 65.724.525.773,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 417.955.743,00 atau sebesar 0,63%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Sasaran 1 dapat diraih dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas output dan outcome yang dihasilkan.

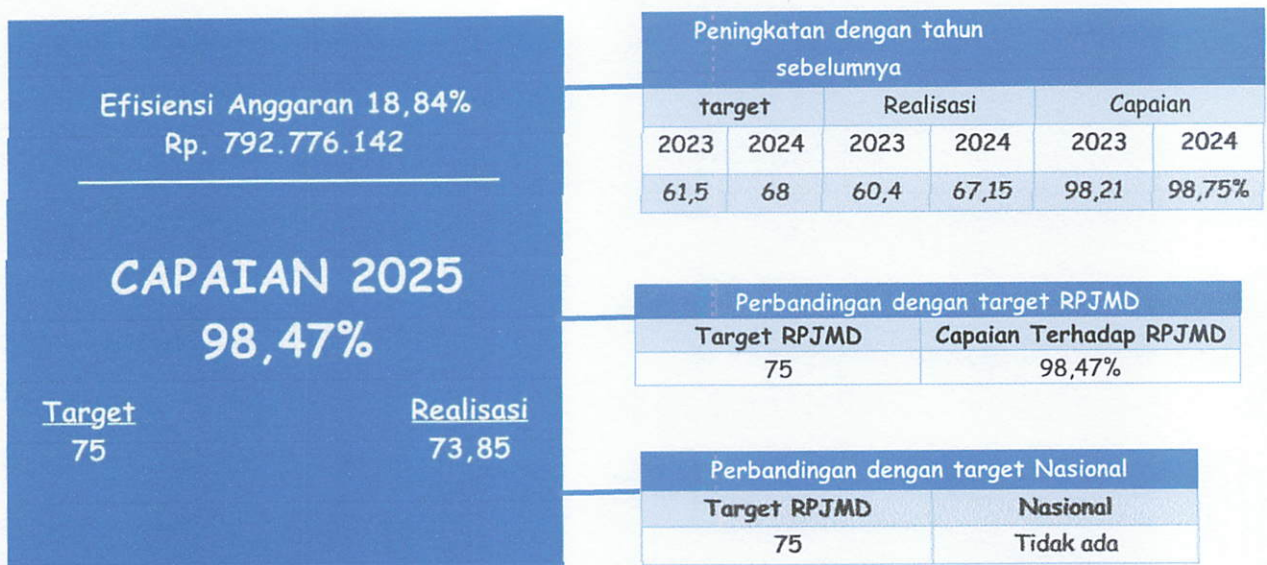


Sasaran Strategis II Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan SAKIP merupakan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penguatan SAKIP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan hasil yang terukur dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Pengukuran capaian Sasaran Predikat SAKIP Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh instansi pembina. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai

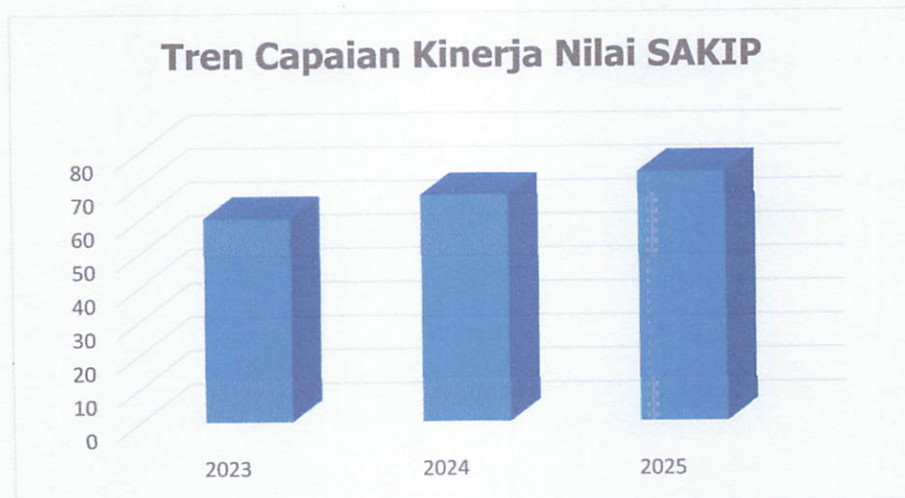
tingkat pencapaian Sasaran Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025, hasil pengukuran kinerja disajikan dalam bentuk infografis. Infografis tersebut menampilkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, capaian terhadap target RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, perbandingan dengan standar nasional, serta tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dimaksud.



Gambar. 3.3 Infografis sasaran strategis II

Berdasarkan infografis di atas, diketahui bahwa capaian kinerja Sasaran Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 mencapai 98,47%, dengan target yang ditetapkan sebesar 75 dan realisasi nilai SAKIP sebesar 73,85. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya telah mendekati target yang ditetapkan dan secara umum berada pada kategori baik.

Ditinjau dari aspek perencanaan jangka menengah, capaian kinerja Tahun 2025 telah sejalan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, dengan capaian terhadap target RPJMD sebesar 98,47%. Sementara itu, perbandingan dengan target nasional belum dapat dilakukan karena belum terdapat standar nasional yang secara spesifik menetapkan target nilai SAKIP bagi perangkat daerah.



Gambar. 3.4 Tren Capaian Kinerja Nilai SAKIP

Belum tercapainya target nilai SAKIP secara optimal pada Tahun 2025 terutama disebabkan oleh kelemahan pada aspek pelaporan kinerja, khususnya dalam penyajian analisis kinerja yang belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, serta capaian outcome dan manfaat program dan kegiatan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap hasil evaluasi SAKIP, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Sebagai alternatif solusi dan upaya perbaikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan perbaikan pada sistem pelaporan kinerja, antara lain melalui penguatan proses monitoring dan evaluasi (monev), peningkatan konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaporan, serta perbaikan kualitas narasi dan analisis capaian kinerja. Meskipun hasil perbaikan tersebut pada Tahun 2025 belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan nilai SAKIP, upaya ini menjadi langkah awal yang penting untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada periode perencanaan selanjutnya.

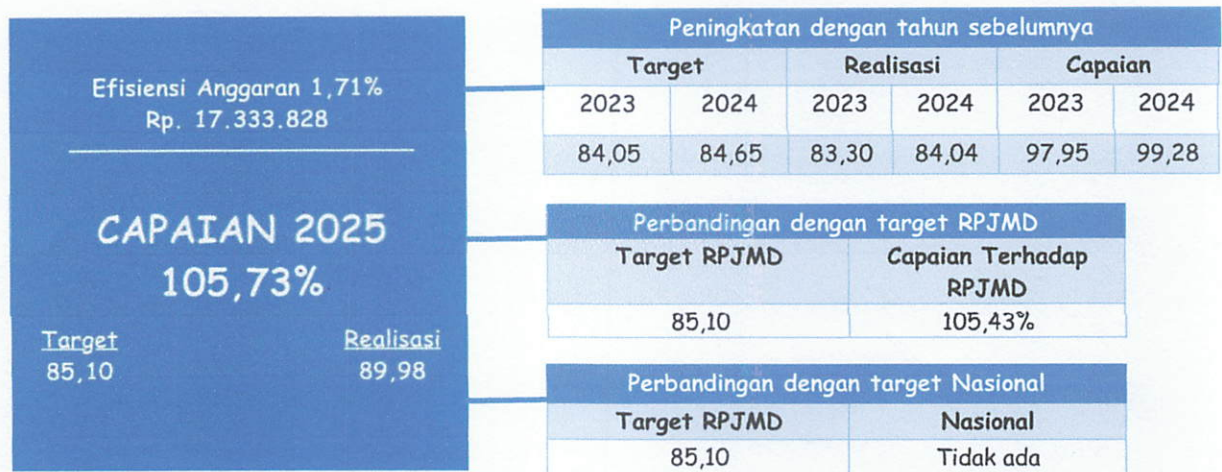
Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian Sasaran Predikat SAKIP Perangkat Daerah didukung oleh pengelolaan anggaran yang efisien, untuk menunjang

pencapaian sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya menganggarkan Rp. 4.208.743.233 dan direalisasikan Rp. 3.415.967.091 (81,16%) dengan tingkat efisiensi sebesar 18,84% atau setara dengan Rp. 792.776.142,00. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

Sasaran Strategis III
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
layanan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan berbagai upaya perbaikan layanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Pelaksanaan SKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, yang bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik.



Gambar. 3.5 Infografis sasaran strategis III

Berdasarkan hasil SKM Tahun 2025, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya mencapai 89,98, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85,10, dengan capaian kinerja sebesar 105,73%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah berada pada kategori sangat baik, serta mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Bakesbangpol.

Ditinjau dari aspek keselarasan dengan dokumen perencanaan jangka menengah, capaian IKM Tahun 2025 telah sejalan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, dengan capaian terhadap target RPJMD sebesar 105,43%. Sementara itu, perbandingan dengan target nasional belum dapat dilakukan karena belum terdapat standar atau target nasional yang secara khusus mengatur nilai IKM bagi perangkat daerah. Meskipun demikian, capaian yang melampaui target RPJMD ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Bakesbangpol telah berada pada jalur yang tepat dan konsisten dengan arah kebijakan pembangunan daerah.



Gambar. 3.6 Tren Capaian Kinerja Nilai IKM

Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 yang melampaui target tidak terlepas dari adanya perbaikan signifikan pada mekanisme pelayanan, khususnya pada pelayanan rekomendasi/izin penelitian. Pelayanan tersebut telah mengadopsi sistem pelayanan berbasis online dan terintegrasi, sehingga mampu memangkas waktu layanan, meningkatkan kepastian prosedur, memperkuat transparansi, serta mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan. Kemudahan akses layanan ini memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan tingkat kepuasan masyarakat.

Selain itu, pencapaian tersebut juga didukung oleh berbagai upaya perbaikan lainnya, antara lain peningkatan kejelasan standar pelayanan, penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kompetensi dan sikap aparatur, serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Upaya-upaya tersebut secara bertahap telah memberikan hasil yang positif, yang tercermin dari respons masyarakat dalam pelaksanaan SKM serta meningkatnya nilai indeks kepuasan yang diperoleh.

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya tetap melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek yang perlu terus diperkuat, seperti konsistensi kualitas

pelayanan pada seluruh jenis layanan, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan layanan berbasis digital, serta optimalisasi pemanfaatan sistem online agar semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Sebagai upaya keberlanjutan, Bakesbangpol terus melakukan penyempurnaan sistem pelayanan terintegrasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan mekanisme evaluasi melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pencapaian sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan didukung oleh penggunaan anggaran yang efisien, jumlah anggaran adalah Rp. 1.014.680.180 dengan realisasi Rp. 997.346.352 (98,29%) dan tingkat efisiensi sebesar 1,71% atau setara dengan Rp. 17.333.828. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dicapai secara efektif dan efisien melalui pengelolaan sumber daya yang optimal. Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang berperan dalam menyediakan dukungan administratif, kelembagaan, serta sarana dan prasarana pelayanan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025, Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 71.365.904.929 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 70.137.839.216 atau tercapai sebesar 98,28%. Lebih rinci mengenai komposisi anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Table 3.3
Realisasi Belanja Bakesbangpol TA 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
A	PENDAPATAN	0	0	0
B	BELANJA	71,365,904,929	70,137,839,216	98.28%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,223,423,413	4,413,313,443	84.49%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122,500,000	122,500,000	100.00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102,500,000	102,500,000	100.00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000	20,000,000	100.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,086,243,233	3,293,467,091	80.60%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,086,243,233	3,293,467,091	80.60%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	474,158,200	474,097,400	99.99%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140,900,000	140,900,000	100.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118,590,000	118,590,000	100.00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80,168,200	80,168,200	100.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27,000,000	27,000,000	100.00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34,500,000	34,500,000	100.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73,000,000	72,939,200	99.92%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235,521,980	227,495,552	96.59%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33,021,980	28,826,572	87.30%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202,500,000	198,668,980	98.11%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305,000,000	295,753,400	96.97%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	255,000,000	245,753,400	96.37%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000	15,000,000	100.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35,000,000	35,000,000	100.00%
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3,830,000,000	3,828,837,500	99.97%

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,830,000,000	3,828,837,500	99.97%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2,210,000,000	2,209,037,500	99.96%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,570,000,000	1,569,800,000	99.99%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50,000,000	50,000,000	100.00%
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	42,743,990,516	42,732,110,842	99.97%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	42,743,990,516	42,732,110,842	99.97%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	175,000,000	174,600,600	99.77%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5,675,120,000	5,675,120,000	100.00%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	36,893,870,516	36,882,390,242	99.97%
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5,683,750,000	5,541,707,520	97.50%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5,683,750,000	5,541,707,520	97.50%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5,620,000,000	5,478,250,520	97.48%

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	63,750,000	63,457,000	99.54%
V		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1,887,025,000	1,886,947,500	100.00%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1,887,025,000	1,886,947,500	100.00%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	910,000,000	910,000,000	100.00%
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	945,625,000	945,547,500	99.99%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	31,400,000	31,400,000	100.00%
VI		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	11,997,716,000	11,734,922,411	97.81%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	11,997,716,000	11,734,922,411	97.81%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2,198,026,000	2,126,312,461	96.74%
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8,815,000,000	8,742,569,950	99.18%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	71,400,000	71,400,000	100.00%
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	913,290,000	794,640,000	87.01%
		Jumlah	71,365,904,929	70,137,839,216	98.28%

Di bawah ini ditampilkan tabel kesesuaian kinerja sasaran strategis, program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja :

Tabel 3.4
Analiss Efisiensi Anggaran Badan Kesbangpol TA. 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program yang mendukung	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa	% Realisasi	Efisiensi
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Persen	100%	100%	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.830.000.000	3.828.837.500	1.162.500	99,97	0,03
					PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	42.743.990.516	42.732.110.842	11.879.674	99,97	0,03
					PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan	5.683.750.000	5.541.707.520	142.042.480	97,50	2,5

					ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.887.025.000	1.886.947.500	77.500	100	0		
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	11.997.716.000	11.734.922.411	262.793.589	97,81	2,19		
2	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75	73,85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	85,10	89,98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	5.223.423.413	4.413.313.443	810.109.970	84,49	15,51		

3.3 Prestasi/ Penghargaan yang Diraih Bakesbangpol

Selama tahun 2025, belum ada Prestasi/ Penghargaan yang iraih Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan ke dalam indikator kinerja.

Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025. Dari hasil analisis kinerja diperoleh pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Realisasi Capaian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	Baik
2	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB (75)	73,85	98,46%	Baik

3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	85,10	89,98	105,73%	Sangat Baik
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja					101.39%	Sangat Baik

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tercapai sebesar **101.39%** maka capaian kinerja dikategorikan **"Sangat Baik"**.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi;
- Mengintensifkan pemantauan dan monitoring serta deteksi dini terhadap potensi konflik yang akan terjadi terutama menjelang dan selama Pemilu berlangsung;
- Meningkatkan kualitas layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Januari 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA


ASEP DARISMAN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680101 198803 1 007